

Evaluasi Efektivitas Integrasi Registrasi Sosial-Ekonomi (Regsosek) dan Mengintegrasikan Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke dalam Platform Digital SIKS-NG untuk Mengurangi Ketidakakuratan (Kesalahan Eksklusi dan Inklusi) dalam Pemilihan Kelompok Sasaran

Desy Miranti¹, Asep Budiawan²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional

desymiranti@iwu.ac.id¹, asep.budiawan@iwu.ac.id²

Article Info

Article history:

Received May 12, 2026

Revised Mei 26, 2026

Accepted June 27, 2026

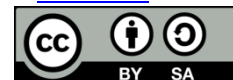
Keywords:

DTKS, Exclusion Error, Inclusion Error, Regsosek, SISK-NG

ABSTRACT

Inaccuracy in the targeted distribution of social assistance in the form of exclusion error (neglect of poor groups) and inclusive out (Registration of non-poor groups) is a structural problem in the social protection system in Indonesia. This study analyzes the effectiveness of integrating the Socioeconomic Registration (Regsosek) and Integrated Social Welfare Data (DTKS) into the digital platform Social Welfare Information System - Next Generation (SIKS-NG) to reduce the margin of error in target group determination. The method used is descriptive qualitative. The results demonstrate that the consolidation of data based on the decile ranking of Regsosek into SIKS-NG significantly improves administrative accuracy and reduces the margin of error in target group determination. inclusive out of non-priority groups. The exclusion errors are still hampered by a limited local digital infrastructure, slow verification procedures for village deliberations, and a lack of public knowledge regarding options for self-complaints. This study concludes that the effectiveness of digital e-welfare platforms is determined not only by the reliability of the system's algorithms, but also by the strengthening of operational capacity at the local level, governance transparency, and the interactivity of public complaint channels.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 12, 2026

Revised Mei 26, 2026

Accepted June 27, 2026

Keywords:

DTKS, Exclusion Error, Inclusion Error, Regsosek, SISK-NG

ABSTRAK

Ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dalam bentuk *exclusion error* (terabaikannya kelompok miskin) dan *inclusion error* (terdaftarnya kelompok non-miskin) merupakan masalah struktural dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia. Studi ini menganalisis efektivitas pengintegrasian Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) ke dalam platform digital Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Generasi Berikutnya (SIKS-NG) untuk mengurangi margin kesalahan dalam penentuan kelompok sasaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi data berdasarkan peringkat desil Regsosek ke dalam SIKS-NG secara signifikan meningkatkan akurasi administrasi dan mengurangi margin kesalahan dalam penentuan kelompok sasaran. termasuk di luar Kelompok non-prioritas. Pengecualian Kesalahan adalah Masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur digital lokal, prosedur verifikasi yang lambat untuk musyawarah desa, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pilihan pengaduan mandiri. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas platform kesejahteraan digital tidak hanya ditentukan oleh keandalan algoritma sistem, tetapi juga oleh penguatan kapasitas operasional di tingkat lokal, transparansi tata kelola, dan interaktivitas saluran pengaduan masyarakat

**Corresponding Author:****Desy Miranti**

Universitas Wanita Internasional

Email: desymiranti@jwu.ac.id**PENDAHULUAN**

Keefektifan perlindungan sosial di Indonesia sering diuji oleh masalah klasik: penargetan yang tidak tepat dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Masalah ini terwujud dalam jumlah yang tinggi. *Exclusion Error* (kelompok kaya yang terdaftar sebagai penerima) dan *Inclusion Error* (komunitas miskin yang terabaikan). Selama bertahun-tahun, Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS), yang dikelola oleh Kementerian Sosial, menjadi dasar utama untuk mengidentifikasi penerima bantuan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Generasi Berikutnya (SIKS-NG). Namun, pembaruan data yang tidak real-time di tingkat regional menyebabkan tingkat kesalahan yang tinggi. Untuk mengatasi masalah pengumpulan data yang terfragmentasi, pemerintah, melalui Bappenas, merancang Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosk) sebagai basis data tunggal yang berisi kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk. Integrasi data Regsosk, yang berfokus pada peningkatan peringkat standar hidup (desil), ke dalam infrastruktur digital SIKS-NG diharapkan dapat menutup kesenjangan terkait manipulasi dan keterlambatan dalam verifikasi dan validasi di lapangan.

Pada dinamika data selama tiga tahun terakhir (2023-2025) terkait penilaian efektivitas ini didasarkan pada dinamika angka kemiskinan dan evaluasi distribusi bantuan sosial nasional. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik Belanda (BPS) mencatat angka kemiskinan sebesar 9,36% (26,90 juta jiwa) pada Maret 2023. Temuan dari Penilaian Kementerian Keuangan Indonesia menunjukkan bahwa tingkat inklusi dalam program prioritas seperti Program Keluarga Harapan (PKH), berdasarkan data SUSENAS, masih di atas 70% di beberapa daerah karena kelemahan dalam usulan tingkat desa/kecamatan. Pada tahun 2024, Tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 9,03% (25,22 juta jiwa) pada Maret 2024. Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan, audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penelitian lapangan masih mengungkap adanya penyimpangan dalam pembayaran bantuan sosial senilai triliunan rupiah. Penyimpangan ini disebabkan oleh penerima yang memiliki beberapa Nomor Identitas Nasional (KTP), pegawai negeri sipil (ASN), personel militer (TNI), dan petugas kepolisian (POLRI), atau orang yang telah meninggal tetapi belum dihapus dari DTKS (jaminan sosial kerja). Selanjutnya, pada tahun 2025, Pemerintah mulai menyelesaikan integrasi Regsosek, P3KE, dan DTKS ke dalam satu basis data. Namun, transisi sistem ini menghadirkan tantangan teknis. Laporan evaluasi dari Kementerian Sosial menyoroti tingginya tingkat salah alokasi bantuan sosial, menekankan perlunya mempercepat digitalisasi penuh infrastruktur SIKS-NG.

Penelitian ini juga selaras dan relevan dengan penelitian terdahulu terkait model integrasi data digital dan dinamika manajemen data telah dibahas dalam berbagai publikasi akademis (Sinta/Scopus). Arsitektur sistem e-wellness sangat bergantung pada sinkronisasi data secara real-time. Gesekan struktural antara basis data pusat dan mekanisme input lokal seringkali menyebabkan kesalahan yang terus-menerus terkait dengan pemasukan data,

sehingga menghambat hasil yang diharapkan dari platform digital untuk pengurangan kemiskinan. (Jurnal Hukum dan Masyarakat Sultan Adam, 2023). Selain itu juga, Masalah pembaruan data di DTKS merupakan penyebab utama kesalahan dalam pencapaian tujuan. Integrasi sistem data tunggal berbasis Regsosek membutuhkan sistem informasi yang efektif di tingkat lokal (SIKS-NG) untuk secara sistematis membatasi kemungkinan manipulasi data yang diusulkan. (Kementerian Keuangan Indonesia, Vol. 8 No. 2)

Mengukur efektivitas integrasi Regsosek dan DTKS ke dalam platform SIKS-NG bukan hanya tantangan teknis dan komputasi, melainkan ujian tata kelola dan akuntabilitas yang baik. Penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana transformasi digital dapat mengurangi pengucilan dan kesalahan pengucilan, memastikan bahwa anggaran perlindungan sosial dialokasikan secara memadai dan memiliki dampak nyata dalam memerangi kemiskinan struktural.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode tersebut mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui analisis data tekstual serta dokumen ilmiah. Data dikumpulkan dari beragam sumber literatur yang relevan, seperti buku akademik, artikel dalam jurnal ilmiah, peraturan dan kebijakan pemerintah, serta laporan penelitian sebelumnya. Proses analisis dilakukan dengan cara menelaah, membandingkan, dan menafsirkan berbagai konsep kunci yang berkaitan dengan Kebijakan publik, peran aparatur dalam birokrasi, serta efektivitas integrasi Regsosek dan DTKS ke dalam platform SIKS-NG. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menghadirkan pemahaman yang komprehensif sekaligus argumentatif terhadap isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi registrasi sosial-ekonomi (Regsosek) dan data kesejahteraan sosial terpadu (DTKS) ke dalam platform digital SIKS-NG secara kualitatif menunjukkan transformasi signifikan dalam arsitektur pengumpulan data perlindungan sosial. Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, pembaruan data terpusat dapat mengurangi kesenjangan informasi antara otoritas pusat dan daerah. Pendekatan ini konsisten dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) dari Davis (1989), di mana persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dari platform SIKS-NG mendorong peningkatan kinerja operasional para pejabat tingkat akar rumput. Peringkat desil kesejahteraan sosial ekonomi yang terintegrasi ke dalam SIKS-NG menyediakan kriteria objektif yang meminimalkan penilaian subjektif selama verifikasi dan validasi, yang secara teoritis mengurangi risiko *inclusion error* sejak tahap proposal awal.

Namun, efektivitas sistem digital ini dalam mengurangi *exclusion error* masih terhambat oleh dinamika prosedural dan kapasitas infrastruktur lokal. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa penduduk yang baru jatuh miskin akibat guncangan ekonomi seringkali

mendaftar terlambat karena proses pengajuan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Fenomena ini memperkuat *Street-Level Bureaucracy Theory* dari Lipsky (2010), yang menjelaskan bahwa diskresi agen pelaksana dan keterbatasan sumber daya di tingkat bawah seringkali menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kebijakan ideal dan implementasi aktual. Kendala teknis seperti sinyal internet yang terbatas dan beban kerja administratif bagi operator desa menyebabkan data dinamis tidak diperbarui secara teratur. *real-time*, sehingga kelompok rentan di komunitas yang kurang beruntung terus terintegrasi ke dalam kategori *exclusion error*.

Dalam dimensi penanganan *inclusion error* Penggunaan basis data Regsosek yang dikombinasikan dengan Nomor Identitas Nasional (KTP) di SIKS-NG telah terbukti efektif dalam mendeteksi penyimpangan administrasi, seperti data ganda atau penerima dari pegawai negeri sipil (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI). Namun, dari perspektif kualitatif, resistensi sosial-politik lokal tetap menjadi tantangan utama dalam proses pencairan bantuan sosial bagi penerima yang tidak memenuhi syarat. Hal ini konsisten dengan teori *Political Economy of Targeting* (Subbarao et al., 2012), yang menyatakan bahwa mekanisme penetapan target bantuan publik selalu konsisten dengan hubungan kekuasaan lokal (*patron-client relation*) dan tekanan dari para pemilih. Para pengelola desa sering menghadapi intimidasi atau dilema sosial ketika mencoba menghapus nama-nama penerima yang tidak memenuhi syarat, sehingga manipulasi data proposal di tingkat lokal masih berpotensi untuk dilakukan / *inclusion error*.

Keefektifan integrasi data dalam platform SIKS-NG juga ditentukan oleh keandalan mekanisme pengaduan masyarakat (*grievance redress mechanism*). Data kualitatif menunjukkan bahwa fungsi penolakan diri atau pengaduan pada SIKS-NG belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat miskin karena keterbatasan literasi digital. Dengan mengacu pada kerangka kerja Tata Kelola *digital* (DEG) yang diprakarsai oleh Dunleavy dkk. (2006), keberhasilan re-integrasi sistem informasi publik sangat bergantung pada interaktivitas, digitalisasi yang ekstensif, dan akses mudah bagi pengguna akhir (*citizen-centric approach*). Tanpa adanya literasi dan umpan balik yang transparan terhadap keberatan warga, platform digital berisiko secara sistematis melegitimasi kesalahan yang ditargetkan karena kurangnya kontrol sosial langsung dari bawah.

Secara keseluruhan, evaluasi kualitatif menegaskan bahwa integrasi Regsosek-DTKS ke dalam SIKS-NG merupakan instrumen teknologi potensial untuk mengurangi *exclusion* dan *inclusion error*. Namun, efektivitasnya tidak bisa berdiri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, *Social Protection System Framework* (Bank Dunia, 2018), Arsitektur registrasi sosial digital yang sukses membutuhkan keselarasan antara perangkat lunak yang canggih, integritas moral para verifikator, dan lembaga lokal yang bertanggung jawab. Integrasi satu set data ke dalam SIKS-NG telah berhasil menciptakan fondasi yang kuat untuk interoperabilitas data, tetapi pengurangan kesalahan target yang berkelanjutan hanya akan tercapai jika pembaruan data dinamis diimbangi dengan penguatan kapasitas operasional desa, pengawasan independen, dan pendidikan publik yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Integrasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Data Jaminan Sosial Terpadu (DTKS) ke dalam platform digital SIKS-NG secara signifikan memperkuat arsitektur pengumpulan data jaminan sosial di Indonesia. Penilaian kualitatif menunjukkan bahwa penggunaan satu set data berdasarkan peringkat desil meningkatkan objektivitas verifikasi dan validasi (*verivali*) dan mengurangi anomali administratif (*inclusion error*), seperti data duplikat atau penerima dari kelompok non-prioritas. Namun, efektivitas sistem ini dalam menekan *exclusion error* masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur digital di tingkat desa, keterlambatan dalam prosedur Musyawarah desa (Musdes), dan resistensi sosial-politik lokal selama proses pengeluaran (*graduasi*) penerima bantuan. Dengan demikian, integrasi sistem informasi digital merupakan alat teknis yang sangat penting, tetapi keandalan dan akurasi penargetannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola (*governance*), serta kapasitas operasional para pelaksana di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat*. <https://www.bpk.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023* (BRS No. 47/07/Th. XXVI). BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024* (BRS No. 43/07/Th. XXVII). BPS RI.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Gentilini, U., Almenfi, M., Orton, I., & Dale, P. (2020). *Social protection and jobs responses to COVID-19: A real-time review of country measures*. World Bank Group. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635>
- Jewed, F., Hartono, S., & Agustanta, R. (2025). Evaluating the effectiveness of social assistance programs for poverty reduction in developing contexts: Implementation challenges and policy imperatives. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 11(2), 1080–1095. <https://doi.org/10.20885/jief.vol11.iss2.art5>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk teknis verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG*. Kemensos RI.

- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service* (30th anniversary ed.). Russell Sage Foundation.
- Marviana, R. D. (2025). Digital transformation of social finance: Innovations in technology, governance, and financial inclusion. *Journal of Financial and Social Innovation*, 5(1), 101–112.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Orfega, M. K., Osang, F. B., & Inyang, U. G. (2025). Data-driven designs for poverty targeting in social protection: A systematic review and meta-analysis of evidence from 2020–2025. *International Journal of Advanced Data Systems and Social Protection*, 6(3), 45–59.
- Subbarao, K., Bonnerjee, A., Braithwaite, J., Carvalho, S., Ezemenari, K., Graham, C., & Thompson, A. (2012). *Safety net programs and poverty reduction: Lessons from cross-country experience*. World Bank Publications.
- Sultan Adam Journal of Law and Society. (2023). Digitalizing social assistance: Challenges of inclusion and exclusion errors in welfare data management. *Sultan Adam Journal of Law and Society*, 2(1), 12–25.
- World Bank. (2018). *Developing a social registry: Technical guide*. World Bank Group.